

**PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI  
DESA/KELURAHAN SEBAGAI WUJUD KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BERBASIS APLIKASI  
(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso)**

**Oleh:**

Dwi Anugerah Surya Ardiansyah, Itok Wicaksono  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) dalam menjawab keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso proses pemasukan data untuk semua desa dapat dikatakan sudah baik, karena dalam meningkatkan program Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun tahapan proses, antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknik dan pengawasan. Demikian halnya menyangkut kebijakan dalam meningkatkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan juga sudah dapat dikatakan baik karena kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan telah dilakukan melalui bimbingan teknologi, Pelatihan Teknologi Informasi kepada operator sehingga operator siap dan *update* data sesuai dengan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Meski demikian dalam pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan ditemukan beberapa persoalan diantaranya: keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan peralatan teknologi yang harus dimiliki.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K), Keterbukaan Informasi Publik

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lahirnya Sistem Adminitrasi Informasi Desa berawal tahun 2009, Combine Resource Institution (CRI) merancang suatu program Sistem informasi Desa (SID), untuk memulihkan kembali kehidupan desa dengan Profile Desa yang masih belum tertata secara rinci untuk menampung keunikan dari data sebuah desadan juga untuk menunjang peningkatan kelengkapan data desa. Sebagai bahan pengambilan data secara bersama-sama dan demokratis, sekaligus mendorong terbangunnya kontrol publik yang efektif terhadap penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa.

Melalui pengembangan sistem informasi dan teknologi berbasis masyarakat (Rangoaini Jahja, dkk, 2012). Selama tahun 2009-2010 program Sistem Informasi Desa(SID) berkembang baik, hal ini dibuktikan pada bulan Oktober 2012 Sistem Informasi Desa telah dipraktikkan di 16 desa wilayah DIY, 73 desa di Jawa Tengah, 1 desa di Jawa Barat, 1 desa di Jawa Timur, dan 1 desa di Nusa Tenggara Timur. Melihat keberhasilan Sistem Informasi Desa yang telah melahirkan pengetahuan untuk mendorong pembaharuan dan kemajuan demokrasi saat ini khususnya di desa.

Kemudian khusus untuk Indonesia bagian timur (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat) Sistem Informasi Desa diperkenalkan dengan nama Sistem Administrasi dan Informasi Desa /Kelurahan (SAID/K). Adapun yang mendorong lahirnya SAID/K yaitu:

1. Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital. Tidak lain langkah yang ditempuh dengan memindahkan dari data kertas menjadi format digital yang tersimpan dalam komputer.
2. Adanya kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data-data lainnya secara cepat dan tepat.
3. Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (open source) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa.
4. Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu.

Pemerintah dalam setiap programnya selama ini selalumenyatakan banyak program-program penanggulangan kemiskinan. Ada program PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan masih banyak lagi. Semua ini dilakukan karena pada kenyataan yang ada di masyarakat masih banyak rakyat miskin yang perlu diberikan penguatan agar terbebas dari belenggu kemiskinan.

Mekanisme penyajian data pembangunan di suatu desa, hendaknya disajikan secara transparan, akuntabel dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini, semula pemerintah daerah Kabupaten Kota di wilayah Indonesia mengembangkan sistem profil desa yang memuat seluruh potensi desa yang ada di wilayah desa masing-masing.

Namun, demikian dalam perkembangannya sistem profil desa yang dimaksud tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi desa yakni SAID (Sistem Administrasi Informasi Desa). SAID merupakan sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam pendokumentasian data milik desa yang memiliki manfaat untuk mempermudah proses pencarian data desa.

Dalam rangka menjamin transparansi realisasi pembangunan di tingkat desa serta untuk meningkatkan partisipasi publik, pihak Pemerintah Kabupaten menyiapkan Sistem Administrasi Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) yang bisa diunduh melalui android. Sebelumnya SAID/K hanya bisa diunduh pada kalangan birokrat dan pejabat pemerintah desa.

Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur telah menyiapkan aplikasi mutakhir bernama Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID/K). SAID/K diharapkan dapat menjadi formula untuk memecahkan masalah kompleks yang terjadi di desa. Usia kerja produktif yang dimiliki desa bisa dapat diberdayakan dengan maksimal. Hal

itu dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat Bondowoso turut serta berpartisipasi mensukseskan program pemerintah itu. Dengan dukungan masyarakat sehingga dapat memberikan penyadaran bagi warga guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kominfo, tahun 2018 sudah mengerjakan 163 desa untuk pembuatan website desa dan sudah bisa diakses oleh warga. Tahun ini, Kominfo menargetkan semua 209 desa dan 10 kelurahan di Bondowoso sudah menggunakan aplikasi SAID/K (Sistem Administrasi Informasi Desa/Kelurahan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan, sudah dilaksanakannya SAID/K di beberapa desa di wilayah kerja kabupaten bondowoso perlu kita lihat bagaimana pengembangan SAID di desa sudah terlaksana sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) atau tidak..

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya membangun sistem administrasi dan informasi desa, maka hal tersebut menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan di atas untuk penyusunan karya tulis ilmiah ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut : “Bagaimana Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) sebagai wujud keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bondowoso?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pengembangan SAID/K dalam menjawab keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bondowoso.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi di bidang Ilmu Pemerintahan mengenai pengembangan SAID/K dalam menjawab keterbukaan informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upaya mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan untuk keterbukaan informasi publik. Manfaat lainnya, yaitu dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

- a. Penelitian pertama yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Galuh Sekar Tanjung dengan topik strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengelola informasi publik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan landasan teori yang digunakan yakni teori tentang Keterbukaan Informasi publik dan teori *Good Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan KIP serta untuk menjelaskan apa saja hambatan dan peluang dari Humas pemerintahan kota Tegal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada beberapa media yang digunakan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan KIP yakni media internet yang dimanfaatkan dalam penggunaan website resmi, media sosial berupa *twitter* dan *facebook* yang dikelola oleh Dishubkominfo sedangkan untuk pengisian konten diisi oleh humas pemerintahan kota. Yang kedua adalah pemanfaatan media berupa radio lokal dan koran lokal kota Tegal untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal juga media internal berupa Majalah. Terakhir adalah pemanfaatan media luar ruang seperti pemasangan baliho serta videotron. (Tanjung, Skripsi, 2016: ix)

- b. Selanjutnya, yang dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah penelitian judul penelitian Peran Humas dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda oleh Ratty Marlya pada tahun 2015. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Peran dan Fungsi Humas, *Good Governance* dan teori tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peranan humas dalam mengimplementasikan kebijakan KIP di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya kelemahan dan kekuatan yang dialami oleh PPID Pemprov Kaltim dan PPID Kota Samarinda dalam implementasi kebijakan KIP, salah satu faktor kelemahannya adalah adanya keterlambatan dalam pembentukan PPID di Pemkot Samarinda yaitu PPID baru dibentuk pada 2013. Sedangkan kekuatannya adalah PPID Pemprov maupun PPID Pemkot Samarinda sama-sama telah terfasilitasi dengan baik mereka telah memiliki *front desk information* untuk pemohon informasi. (Fitriah, Skripsi, 2015: 105-107)

- c. Penelitian selanjutnya mengangkat topik kajian tentang Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada warga kota. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Agus Setiawan, Dadang Sugiana dan Jimi Narotama M. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk informasi yang disediakan oleh Pemerintahan kota Bandung dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakatnya, dan juga untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan kota Bandung mengoptimalkan sumber daya dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kota Bandung tidak memahami tentang keterbukaan informasi publik karena masyarakat kota Bandung tidak memahami apa saja bentuk informasi yang digunakan oleh pemerintahan kota Bandung dalam upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Salah satu contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut adalah sebagian masyarakat kota Bandung mengetahui bahwa setiap ada pembangunan sarana publik maka selalu tersedia pengumuman tentang batas waktu, pengerjaan, biaya dan sebagainya tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan upaya dari implementasi keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung terkait dengan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat kurang memahami berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan kota Bandung dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. (Setiawan, Sugiana dan Narotama, Jurnal Kajian Komunikasi, No. 2, Desember 2013: 9-10)

- d. Penelitian dengan topik kajian tentang implementasi UU KIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda pada tahun 2015 juga menjadi referensi dalam penelitian ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Khairunnisa Kamilah. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana peranan yang dilakukan oleh Bappeda dalam upaya mengimplementasikan kebijakan UU KIP di kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Bappeda adanya layanan akses berupa informasi wajib dan disediakan secara berkala seperti informasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta informasi yang wajib diadakan setiap saat yaitu berkaitan dengan data-data terkait pembangunan, evaluasi, dan pengendalian. Dikarenakan website resmi bappeda ([bappeda.samarindakota.go.id](http://bappeda.samarindakota.go.id)) sedang dalam masa perbaikan maka apabila masyarakat kota Samarinda ingin mengetahui informasi terkait dengan pembangunan daerah, dapat secara langsung datang ke Kantor Bappeda untuk melihat dokumen yang bahkan bisa dicopy dan disimpan dalam bentuk *soft file*. (Kamilah, eJurnal Ilmu Pemerintahan No. 3, 2015: 10-11)
- e. Penelitian dengan judul Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya menciptakan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang) oleh Rizki Dwi Prabowo pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, sehingga dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik tidak berjalan dengan efektif. Dari ketiga badan publik yang menjadi objek dalam penelitian ini, Dinas Pendidikan merupakan Badan Publik yang paling lengkap dalam penyajian informasi publik dibandingkan dengan BAPPEDA dan DPKAD. Kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilandaskan oleh kurang maksimalnya sosialisasi terkait implementasi UU tersebut oleh Humas Pemerintahan Kota Semarang sehingga petugas terkait kurang memahami bagaimana pelaksanaan dari kebijakan keterbukaan informasi tersebut. Selain itu keterbatasan personil dan anggaran juga menjadi alasan lain mengapa pelaksanaan UU KIP tersebut belum berjalan secara maksimal. (Prabowo, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, No. 2, 2014: 26-29)
- f. Terakhir adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan topik kajian tentang implementasi kebijakan KIP dalam Website pemerintahan Daerah dengan membandingkan beberapa website resmi pemerintahan yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Daru Nupikso berupa Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2015. Hasilnya ditemukan bahwa secara keseluruhan website pemerintahan daerah memiliki kelemahan dalam implementasi kebijakan KIP walaupun terdapat beberapa website pemerintahan daerah yang cukup baik memberikan layanan informasi publik. Adanya penelitian tersebut memperlihatkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara website pemerintahan daerah yang pernah mendapatkan penghargaan TIK dengan website

pemerintahan daerah yang belum pernah mendapatkan penghargaan yaitu pada kelengkapan informasi yang disajikan dalam website pemerintahan daerah tersebut. (Nupikso, Jurnal IPTEK-KOM, No.2, Desember 2015: 1)

Dari keenam penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, letak kebaruan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang akan dilakukan adalah Dinas Kominfo Kabupaten Bondowoso. Selain itu, narasumber dalam beberapa penelitian terdahulu hanya dilakukan pada internal pemerintahannya saja sedangkan dalam penelitian ini, peneliti juga akan mewawancarai beberapa narasumber dari masyarakat untuk meng-*cross check* informasi yang telah diperoleh peneliti dari internal pemerintah.

## 2.2 Kerangka/Landasan Teori

### 2.2.1 Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K)

Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) dalam arti sempit dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data milik desa untuk memudahkan proses pencariannya, sedangkan dalam arti luas sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa. SAID/K terlebih dahulu dipasang pada perangkat desa, kemudian unsur-unsur warga desa yang dipilih mengisi data kependudukan, dan aset desa. Kumpulan data yang tersimpan dalam komputer tersebut akan dapat dicari dan diolah sewaktu-waktu baik dalam bentuk data individual, keluarga, maupun variasi data yang dibutuhkan.

Informasi yang ada dalam SAID/K meliputi :

1. Basis data kependudukan desa, meliputi data dasar keluarga (13 informasi dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll).
2. Informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya.
3. Basis data sumber daya desa, memuat data tentang potensi desa.
4. Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat desa/ kelurahan.
5. Informasi jumlah keluarga penerima Raskin dan Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan.

Desa membutuhkan Sistem Administrasi dan Informasi untuk menyimpan, memproses dan memperbaharui data dan informasi tentang warga dan potensi desa. SAID/K memiliki spesifikasi dan keunggulan yang dapat mendukung pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan warga. Desa yang memiliki SAID/K dapat menjadi lebih baik dalam memahami kondisi dan kebutuhannya, sehingga dapat merencanakan desa dengan merujuk pada ketersediaan sumber daya di dalam maupun di luar desa.

Tujuan diadakannya SAID/K, yaitu :

1. Menyimpan dan memperbaharui database warga yang aman dan akurat.
1. Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan lokal.
2. Membantu proses penyusunan perencanaan desa.
3. Menjadi alat partisipasi warga desa agar dapat terlibat dalam pembangunan desa.

Manfaat SAID, antara lain :

1. Perencanaan pembangunan desa

Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan. Misalnya SAID dipergunakan untuk merencanakan suatu program perbaikan gizi Balita disuatu desa. Dalam perencanaan ini sangat diperlakukan bata beberapa banyak jumlah anak balita yang ada di desa tersebut. untuk keperluan ini, penggunaan said sangat membantu menemukan data dengan cepat dan akurat. Dalam praktiknya di beberapa desa yang belum mengaplikasikan SAID, biasanya untuk memperoleh data anak usia balita ini sangat kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama. ini disebabkan proses secara manual untuk memilih dan mengklasifikasi atau mengelompokan data usia balita memerlukan ketelitian tinggi dan membosankan.

2. Keterbukaan informasi.  
Sebagai bentuk praktik demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya. Dalam konteks ini said telah memberikan manfaat dan ruang serta akses bagi warga desa untuk mencapai tujuan tersebut
3. Pendapatn kesejahteraan sosial ekonomi warga.  
Said telah dimanfaatkan di beberapa desa untuk kepentingan oleh Data pemetaan kesejahteraan sosial ekonomi secara partisipatif. Dengan indikator lokal. Dalam praktiknya menunjukkan bahwa Desa yang melakukan pemetaan kemiskinan ini dapat dengan mudah menemukanli dimana dan siapa yang masuk dalam katagori miskin atau tidak miskin. Data ini yang kemudian menjadi dokumen desa yang dapat di pergunakan untuk verifikasi data yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak non-pemerintah.
4. Pendapatn pelayanan dasar  
Tidak tersedia data yang akurat serta penggunaan sistem manual dalam membangun data di desa biasanya pelayanannya lamban. Di desa-desa yang telah menggunakan SAID dalam praktiknya hampir secara keseluruhan terjadi peningkatan kecepatan pelayanan publik dalam bentuk cetak surat-menyurat, dll. Secara singkat SAID dapat memangkas penerobosan waktu.
5. Penanggulngan kebencanaan  
Di wilayah rawan bencana, SAID dapat dimanfaatkan untuk membangun basis data kependudukan dan sumber daya yang ditujukan sebagai bagian dari pemetaan potensi penanggulngan bencana. Desa rawan bencana dapat bekerjasama dengan desa penyangga (desa aman terdekat dari wilayah bencana) untuk membangun basis data bersama tentang keadaan yang terkait dengan kebencanaan. Untuk keperluan ini dapat memanfaatkan SAID, misalkan, untuk membuat basis data inventarisasi jalur evakuasi, titik kumpul, persebaran lokasi penampungan korban bencana beserta daya tampung, membuat data base tentang jumlah, indentitas dan karakteristik lainnya dari penduduk desa rawan bencana, dan seterusnya. Jika terjadi bencana, hal tersebut sangat berbagai keadaan korban bencana sehingga mempermudah dalam koordinasi penanganannya

Manfaat SAID bagi warga:

1. Masyarakat mudah memperoleh informasi dan dokumen desa sesuai dengan yang diperlakukan.
2. Masyarakat dapat mengawal secara aktif usulan musrenbangdes, jika portal desa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan daftar usulan desa dan dokumen-dokumen alokasi anggaran kabupaten.
3. Jika aplikasi media interaktif diintegrasika ke dalam sistem (radio komunikasi, buletin, SMS gateway) maka ruang kontrol dan pelibatan warga

terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa/supra desa dapat berfungsi optimal.

### 2.2.2 Dasar Hukum adanya SAID/K

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6/2014 ini selain menjadi kekuatan baru untuk mengatur tata kelola desa, juga secara spesifik mengatur tentang Sistem Informasi Desa. Hal ini diatur dalam bab IX, bagian ketiga perihal “Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Pasal 86 menyatakan:
  - (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
  - (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  - (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
  - (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini dirancang untuk menjadi instrumen yang memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan, maka pemanfaatan SAID/K oleh pemerintah di tingkat desa hingga kabupaten juga bertujuan untuk memfasilitasi publik dalam memperoleh informasi. Sebagaimana hak yang dilindungi oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 yang diantaranya bertujuan :
  - a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
  - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Desa berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai standar pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat. UU No. 25/2009 mengatur hak partisipasi masyarakat dalam hal:
  - asas pelayanan publik (pasal 4, huruf f);
  - hak masyarakat (pasal 18);
  - standar pelayanan (pasal 20 ayat 2);
  - pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik (pasal 35)
  - peran serta masyarakat (Bab VI pasal 39); dan
  - penyelesaian pengaduan (pasal 40).

### 2.2.3 Kerangka Berpikir

Membangun SAID/K dengan Prinsip Partisipatif. Dalam mengembangkan SAID/K yang berbasis masyarakat, partisipasi merupakan salah satu unsur penting untuk keberhasilan program ini. Salah satu pengertian partisipasi tersebut dapat merujuk pada keterlibatan

masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatan tersebut. Partisipasi warga dimulai dari perencanaan, perumusan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas, pemanfaatan sampai pada tahap evaluasi dan monitoring. Tanpa elemen-elemen tersebut keberlanjutan tentang sebuah program akan diragukan.

Adapun tahap-tahap pembangunan SAID/K tersebut adalah :

#### 1. Diskusi Intensif

Tahap ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang pengembangan SAID/K. Masyarakat ditantang untuk menyampaikan aspirasi dan manfaat jika ada sebuah sistem yang terencana. Setelah

terbangun pemahaman tersebut, masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama menggali apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk program ini serta bagaimana mekanisme keterlibatan dalam proses program ini. Keluaran dari sebuah diskusi intensif adalah berupa peta kerangka kegiatan yang akan menjadi rujukan untuk membangun sebuah sistem.

#### 2. Sosialisasi Program SAID/K

Merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan pembangunan SAID/K. Penyebaran informasi tentang program ini bagi masyarakat luas bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, yang mampu mempengaruhi cara berpikir melihat kondisi lingkungan atau desanya.

#### 3. Training (Pelatihan) Kepada Perangkat

Pelatihan ini dilakukan sebagai upaya memperkenalkan perangkat lunak (software) yang ada kepada perangkat Pemerintah Desa ataupun warga, untuk mendapat masukan atau penambahan konten (isi) serta pengenalan awal tentang manfaat serta teknik pengaplikasian.

#### 4. Pendataan/pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka mengisi konten. Data yang dimasukkan bisa berupa data yang memang sudah tersedia di pemerintah desa, namun bisa pula dilakukan pendataan baru agar data yang diperoleh bisa lebih kaya dan valid. Sumber data ini ada tiga, yakni : sumber data kependudukan dari kartu keluarga, sumber data kependudukan dari profil desa dan sumber data yang diinisiasi bersama oleh komunitas. Pada tahap ini juga dilakukan peningkatan keterampilan dalam pengarsipan sebuah data sesuai dengan kategorinya.

#### 5. Input dan Olah Data

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah memasukkan data ke dalam sistem untuk diolah. Tim entri data mendapat pelatihan yang memadai tentang penggunaan komputer maupun ketelitian memeriksa data yang telah masuk. Seringkali data yang telah diisi kurang jelas sehingga perlu diverifikasi kembali ke lapangan. Tim ini bisa terdiri dari perangkat desa ataupun komunitas-komunitas yang ada atau mereka yang memiliki kapasitas mengoperasikan komputer.

#### 6. Pelatihan Aplikasi SAID/K

Pelatihan aplikasi dilakukan setelah seluruh data sudah masuk ke dalam sistem dan sudah siap dioperasikan. Pelatihan ini dilakukan kepada perangkat yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, sebaiknya pelatihan juga melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga apabila bagian pelayanan berhalangan hadir, proses pelayanan publik dapat diperankan oleh perangkat yang lain. Keluaran pelatihan aplikasi SAID/K adalah keterampilan untuk pemutakhiran (updating) aplikasi.

#### 7. Pelaksanaan Program

Tahap ini merupakan praktik pengoperasian program SAID/K untuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang menggunakan sistem ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan yang manual. Keluaran dari tahap pelaksanaan program adalah keterampilan perangkat desa menggunakan aplikasi untuk melayani masyarakat.

#### 8. Evaluasi dan Penyempurnaan

Dalam rangka melengkapi atau memperbaiki sistem yang sudah ada, maka harus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis maupun yang substansial. Misalnya sejauh mana pemanfaatan data oleh masyarakat, metode apa yang lebih tepat dan praktis, organisasi-organisasi sosial apa yang telah dilibatkan, dan lain-lain.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu.

Berkenaan dengan uraian di atas, penulis akan menggambarkan hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi dalam Meningkatkan Program Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) Berbasis Aplikasi di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini difokuskan di Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bondowoso

#### 3.2 Lokasi penelitian

Menurut Moeleong (2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori *substantive* dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bondowoso. Adapun program yang akan dibahas adalah Implementasi Sistem Administrasi dan informasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Bondowoso yang sudah berjalan mulai akhir tahun 2017.

#### 3.3 Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber maka ditetapkan data primer dan data sekunder.

- a. Data ini bersumber dari responden secara langsung.  
Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan keterangan lainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

#### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data”.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

**a. Wawancara** Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah staf yang membidangi Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan yang berbasis Aplikasi di Kabupaten Bondowoso

**b. Observasi**

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap perilaku penerbitan perijinan serta perilaku masyarakat yang sedang mengurus izin lokasi.

**c. Dokumentasi**

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### 3.5 Metode Penentuan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui mengenai Program Sistem Keuangan Desa di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan. Seperti halnya yang telah dipaparkan pada data primer tersebut.

### 3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut: Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengaruh dan sebab akibat.

### 3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83).

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*Member Check*).
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (*Peer Debricfing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan. Adapun macam dari triangulasi memiliki tiga macam yang pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi dan wawancara dengan narasumber secara langsung serta dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kesempatan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas, Kasubbag Perencanaan dan Kasub.

Bidang Teknik Informatika. Masing-masing menjelaskan tentang kepentingan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan sebagai wujud keterbukaan informasi dan peran strategis Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya meningkatkan potensi sumber daya manusia dan potensi sarana prasarana yang mendukung kemajuan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan akan terus diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang dikemas dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam setiap kegiatan tahun berjalan dan seterusnya”.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjelaskan pula bahwa: “Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan harus diemban dan diupayakan data-datanya valid. Oleh karena itu, setiap waktu akan dilatih kemampuan standart peningkatan sumber daya manusia selalu diikuti dengan diklat-diklat”.

Sementara itu, Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwa:

“Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan di dalam pembangunan desa sangat penting, oleh karenanya setiap tahun penganggaran yang berkaitan dengan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan akan terus dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Bondowoso”.

Sedangkan menurut menurut hasil wawancara dengan Kasub. Bidang Teknik Informatika dapat dijelaskan bahwa: “perencanaan dapat dilaksanakan setiap desa dengan anggaran APBD berikut juga pengembangan kewenangan pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan di bolehkan dianggarkan dari APBDes”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso menjelaskan pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan di Kabupaten Bondowoso telah menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

“Pada dasarnya Sistem Informasi Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 86 ayat 5 menegaskan bahwa Sistem Informasi Desa dikelola oleh pemerintah desa. Namun demikian, sebagaimana tugas Komunikasi dan Informatika yang memperakarsai jaringan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan adalah mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan dengan metode partisipasi. Partisipasi merupakan salah satu unsur penting untuk keberhasilan program ini. Salah satu penegtian partisipasi tersebut dapat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatan tersebut. Partisipasi warga dimulai dari perencanaan, perumusan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas, pemanfaatan sampai pada tahap evaluasi dan monitoring. Tanpa elemen-elemen tersebut keberlanjutan tentang sebuah program akan diragukan”.

Lebih lanjut menurut penjelasan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa:

“Banyak hal yang dapat di informasikan dari desa ke Kabupaten dalam perencanaan desa dalam kaitannya dengan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan.

Dalam perencanaan desa memberikan informasi tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan desa usulan-usulan dalam musrenbang desa yang sudah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan data kemiskinan yang diperoleh melalui pemetaan partisipatif oleh warga berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat.

Kemudian sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjelaskan materi informasi yang dapat diberikan dari kabupaten ke desa dalam Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan, pemerintah kabupaten dapat dengan mudah menginformasikan tentang perencanaan pembangunan dalam Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan sampai kepada pagu indikatif anggaran. Informasi ini akan mempermudah dalam penyusunan perencanaan desa dalam proses sinkronisasi dan sinergi perencanaan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan juga dapat memberikan data dan informasi tentang data kemiskinan sampai ke tingkat desa karena update data bisa dilakukan secara berkala oleh pemerintah desa.

Adapun tahap-tahap pembangunan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan di Kabupaten Bondowoso berdasarkan data lapangan yang diperoleh adalah :

**1. Diskusi Intensif**

Tahap ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan. Masyarakat ditantang untuk menyampaikan aspirasi dan manfaat jika ada sebuah sistem yang terencana. Setelah terbangun pemahaman tersebut, masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama menggali apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk program ini serta bagaimana mekanisme keterlibatan dalam proses program ini. Keluaran dari sebuah diskusi intensif adalah berupa peta kerangka kegiatan yang akan menjadi rujukan untuk membangun sebuah sistem.

**2. Sosialisasi Program Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan**

Merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan pembangunan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan. Penyebaran informasi tentang program ini bagi masyarakat luas bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, yang mampu mempengaruhi cara berpikir melihat kondisi lingkungan atau desanya.

**3. Training (Pelatihan) Kepada Perangkat**

Pelatihan ini dilakukan sebagai upaya memperkenalkan perangkat lunak (software) yang ada kepada perangkat Pemerintah Desa maupun warga, untuk mendapat masukan atau penambahan konten (isi) serta pengenalan awal tentang manfaat serta teknik pengaplikasian.

**4. Pendataan / Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka mengisi konten. Data yang dimasukkan bisa berupa data yang memang sudah tersedia di pemerintah desa, namun bisa pula dilakukan pendataan baru agar data yang diperoleh bisa lebih kaya dan valid. Sumber data ini ada tiga, yakni : sumber data kependudukan dari kartu keluarga, sumber data kependudukan dari profil desa dan sumber data yang diinisiasi bersama oleh komunitas. Pada tahap ini juga dilakukan peningkatan keterampilan dalam pengarsipan sebuah data sesuai dengan kategorinya.

**5. Input dan Olah Data**

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah memasukkan data ke dalam sistem untuk diolah. Tim entri data mendapat pelatihan yang memadai tentang penggunaan komputer maupun ketelitian memeriksa data yang telah masuk.

## 6. Pelaksanaan Program

Tahap ini merupakan praktik pengoperasian program Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan untuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang menggunakan sistem ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan yang manual. Keluaran dari tahap pelaksanaan program adalah keterampilan perangkat desa menggunakan aplikasi untuk melayani masyarakat.

## 7. Evaluasi dan Penyempurnaan

Dalam rangka melengkapi atau memperbaiki sistem yang sudah ada, maka harus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis maupun yang substansial. Misalnya sejauh mana pemanfaatan data oleh masyarakat, metode apa yang lebih tepat dan praktis, organisasi-organisasi sosial apa yang telah dilibatkan, dan lain-lain.

### ➤ Tahap Keterlibatan Warga

Secara umum, keterlibatan warga harus ada dalam 4 hal :

#### 1. Pendataan

Untuk mengkonfirmasi dan memutakhirkan database dapat dilakukan secara langsung pada saat petugas enumerator datang ke rumah warga khusus dalam rangka kegiatan pendataan. Secara tidak langsung, konfirmasi dan pemutakhiran juga dapat dilakukan saat warga datang ke kantor desa untuk kebutuhan memperoleh layanan administrasi. Khusus untuk membangun analisis kemiskinan secara partisipatif, keterlibatan warga desa dari berbagai elemen, mutlak diperlukan.

#### 2. Memasukkan Data

Kegiatan ini juga dapat melibatkan anggota masyarakat, tentunya dengan mandate yang diberikan pemerintah desa sebagai pengelola utama Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan.

#### 3. Publikasi Data

Publikasi data dengan menyebarluaskan bagian-bagian tertentu yang merupakan data olahan adalah bagian yang penting untuk mendorong rasa kepemilikan warga terhadap Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan. Publikasi yang bersifat regular juga menjamin proses verifikasi dan kemanfaatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan.

#### 4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan terdiri dari perangkat computer dan aplikasi yang dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut oleh desa. Oleh karena itu, warga yang memiliki kemampuan teknis dapat dilibatkan untuk mengembangkan aplikasi maupun memelihara jika terjadi gangguan pada sistem.

### ➤ Aspek Keamanan dan Otoritas Pengelola Data

Otoritas (pemberian wewenang) dalam menggunakan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan diberikan secara bertingkat, sehingga tanpa hak akses dari pemerintah desa, menambah, mengubah maupun mencopy data tidak mungkin dilakukan pihak manapun.

Hirarki hak akses tersebut di bagi menjadi 4 yaitu :

1. **Administrator**, yaitu petugas yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk menambah, menghapus atau mengubah data. Oleh karena itu hak dan otoritas aksesnya adalah yang tertinggi. Administrator bertanggung jawab untuk mengelola semua konten (isi) yang ada di aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan. Bertanggung jawab terhadap kevalidan dan pengelolaan data. Administrator memiliki

wewenang untuk mengubah pengguna (user) dan juga mengubah kata kunci (password).

2. **Operator**, yaitu petugas yang dapat melihat data olahan namun tidak dapat mengubah atau memodifikasi data tersebut. Operator adalah representasi beberapa kelompok warga. Wewenangnya mirip dengan administrator, namun tidak dapat mengubah data pengguna dan juga kata kunci.
3. **Redaksi**, yaitu jurnalis warga yang dapat melihat dan menampilkan data olahan, namun tidak dapat mengubah atau memodifikasi data tersebut. Wewenangnya diberikan sebatas mengelola web desa atau SMS gate-way.
4. **Pengguna (user) Umum**, yaitu warga yang haknya sama seperti Redaksi.

➤ **Penguatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan Lewat Pembangunan Media Komunitas**

Beberapa program yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial di masyarakat tidak lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga kenyataan di lapangan akan menunjukkan suatu fakta target yang akan dicapai seringkali tidak terpenuhi. Program yang mulanya diharapkan dapat berkelanjutan pada akhirnya tidak berjalan maksimal dan yang lebih mengkhawatirkan adalah lahirnya sikap ketergantungan. Untuk mengantisipasi kejadian seperti ini biasanya akan lebih efektif jika sebelumnya dilakukan langkah-langkah **mengidentifikasi masalah** dengan prinsip-prinsip enkulturasi penuh.

Setelah mendapatkan gambaran umum bagaimana masalah-masalah tersebut, kita akan melangkah pada tahap “**pemetaan struktur sosial**” . Langkah ini ditempuh untuk mendapatkan secara detail bagaimana relasi antar individu ataupun kelompok di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga kompleksitas struktur sosial yang berkembang di dalamnya dapat diuraikan secara sederhana. Untuk itu pertanyaan ini menjadi penting untuk kita refleksikan : Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa? Fakta hubungan yang baik di antara kedua pihak ini penting untuk diperiksa. Mengapa? Karena hubungan yang harmonis di antara perangkat desa dan warganya akan mendorong efektivitas dari program ini.

Selanjutnya dalam wawancara dengan sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi juga menanyakan manfaat Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan atau pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan dalam manfaatnya kepada masyarakat pedesaan / perkotaan. Lebih lanjut dalam tanggapan dimaksud sekretaris menjelaskan sebagai berikut:

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan sekaligus mengoreksi pengaturan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini merupakan sebagian pengaturan perencanaan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Pertama*, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota (Pasal 79 ayat 1). *Kedua*, Program Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang berskala local Desa dikoordinasikan dan / atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa (Pasal 79 ayat 6). *Ketiga*, Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota (Pasal 79 ayat 7). *Keempat*, Pembangunan local berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa (Pasal 91 ayat 4)”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang pembangunan Kawasan Perdesaan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota (Pasal 83 ayat 1). Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan Pemerintah Desa (Pasal 83 ayat 4). Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati / Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pasal 83 ayat 5).

Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa dan pembangunan daerah perlu dibuat dengan maksud agar kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan dalam mendayagunakan sumber-sumber pembangunan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Oleh karena itu dalam kaitan hubungan desa dengan supra desa, informasi timbale balik tentang perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan harus berjalan lancar dan berkelanjutan. Inilah pentingnya pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan dalam menyediakan informasi tentang keadaan desa secara akurat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa maupun antar desa (kawasan perdesaan). Dengan demikian, baik desa maupun supra desa sangat berkepentingan untuk memanfaatkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan yang terpasang di desa.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan di Kabupaten Bondowoso perlu terus ditingkatkan karena berjalan kurang optimal. Tetapi dilihat dari segi kapasitas kelembagaan di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan program Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan sudah dikategorikan baik karena semua desa secara keseluruhan menerapkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan. Dan dapat dilihat dari segi konseptual kapasitas building terdiri dari :

1. Proses pemasukan data semua desa sudah dikatakan baik karena dalam meningkatkan program Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan di Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun tahapan proses antara lain perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknik dan pengawasan.
2. Sumber daya manusia berupa operator merupakan salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan terhadap kapasitas suatu lembaga yaitu sumber daya manusia (kompetensi operator) diminta untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Dalam meningkatkan kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan. Dan pelatihan sumber daya manusia di tuntut secara periodic sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sains dan teknologi.
3. Kebijakan dalam meningkatkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan sudah dikatakan baik karena kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan dapat melalui bimbingan teknologi, Pelatihan Teknologi Informasi kepada operator sehingga operator siap dan update data sesuai dengan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Dalam Struktur organisasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan Dinas Komunikasi dan Informatika berada dalam kasubbag yang mengampu Teknologi Informasi

## 5.2 Saran

1. Dalam kesempatan ini Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan untuk lebih ditingkatkan keterampilan sumber daya manusianya dikarenakan kebutuhan data berkembang dengan pesat sejalan dengan konsep pembangunan yang terus berjalan begitu dinamis.
2. Peran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember perlu juga ditingkatkan dalam memfasilitasi pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan sehingga kedepannya dapat berjalan lebih baik
3. Peran seluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bondowoso perlu juga ditingkatkan dalam memfasilitasi pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa / Kelurahan sehingga kedepannya dapat berjalan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anni Milen. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja
- Arikunto. 1988. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Grindle, Merilee. 2009. *Going Local : Decentralization, Democratization and the Promise Good Governance*. New Jersey :Preston Univercity
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press
- Lubis, dan husin. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta ; Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Kualitatif* (diterjemahkan oleh Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta : Universitas Indonesia
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Ranggoaini Jahja, dkk. 2014. *Sistem Administrasi dan Informasi Desa/ Kelurahan*. Australian Community Development and civil Society Strengtheng Scheme (ACCESS) Tahap II
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, *Peraturan Bupati Bondowoso Tentang Stuktur Perangkat Daerah Dinas Informasi dan komunikasi*